

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA MAKASSAR**

**DHENIA LIZARIANI HAFSA**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**DHENIA LIZARIANI HAFSA**

**(A011181346)**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

**DHENIA LIZARIANI HAFSA**  
**A011181346**

Telah dipertahankan dalam ujian sidang skripsi

Makassar, 27 Juli 2023

Pembimbing I



**Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D.**  
NIP. 19660118 199002 1 001

Pembimbing II



**Dr. Sabir, SE., Msi., CWM**  
NIP. 197407155 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sabir, SE., Msi., CWM®.**  
NIP. 197407155 200212 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

**DHENIA LIZARIANI HAFSA**

**(A011181346)**


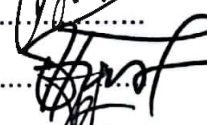


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 15 Agustus 2023 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF.	Anggota	3..... 
4.	Fitriwati Djam'an, SE., M. Si.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



NIP. 197407152002121003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Dhenia Lizariani Hafsa**  
Nomor Pokok : A011181346  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Hasanuddin  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan



**Dhenia Lizariani Hafsa**

**(No. Pokok: A011181346)**

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya untuk sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik lagi bagi para pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan juga kepada junjungan nabi yang telah membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

2. Kepada Bapak Muhammad Amin dan Almh. Aas Hasnah Farida selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
3. Kepada adik penulis yaitu Alexa Anastya Putri yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D. selaku Pembimbing Utama penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. selaku pembimbing pendamping yang juga senantiasa memberikan arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF. dan Ibu Fitriwati Djam'an SE., M.Si. selaku penguji pertama dan kedua penulis yang telah memberikan banyak saran, dan arahan yang membangun pada ujian seminar proposal dan ujian skripsi penulis.
7. Staff Departement Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
8. Kepada Seluruh Keluarga Mahasiswa FEB-UH yang telah menjadi teman seperjuangan dan teman berbagi pengalaman sepanjang proses perkuliahan penulis.
9. Kepada Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (Himajie

FEB-UH) yang telah menjadi tempat berproses penulis sepanjang perkuliahan berlangsung.

10. Kepada Teman-Teman Pengurus Himajie FEB-UH Periode 2021 dan Periode 2022 yang telah membantu dan memberikan pelajaran berharga kepada penulis selama masa kepengurusan.
11. Kepada Teman-Teman seperjuangan penulis Adda, Risma, Lalla, Lin, Dilo, yang telah membantu dan menemani penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi.
12. Kepada Nurhikmah yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsinya
13. Kepada Teman-Teman Lantern 2018 yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang membantu dan menemani penulis dalam berproses selama masa perkuliahan, dan kebersamaan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA MAKASSAR**

Dhenia Lizariani Hafsa

Muhammad Amri

Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden dengan metode analisis yang digunakan ialah regresi linier berganda. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer, dengan variabel dependen yaitu permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar dan variabel independen adalah suku bunga kredit, nilai agunan, pendapatan dan jangka waktu kredit. Hasil penelitian menunjukkan suku bunga kredit dan nilai agunan tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar, sedangkan pendapatan dan jangka waktu kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar.

**Kata Kunci: Permintaan KUR, Suku Bunga Kredit, Nilai Agunan, Pendapatan, Jangka Waktu Kredit**

## **ABSTRACT**

### **Analysis Of Factors Affecting The Demand of People's Business Credit In Makassar City**

Dhenia Lizariani Hafsa

Muhammad Amri

Sabir

This study aims to analyze the factors that influence the demand of people's business credit in Makassar City. The sample used amounted to 100 respondents with the analysis method used was multiple linear regression. The type of data in this study is primary data with the dependent variable being demand of people's business credit in Makassar City and the independent variables being loan interest rates, collateral value, income and credit period. The results showed that loan interest rates and collateral value had no effect on demand of people's business credit in Makassar City, while income and credit period had a positive and significant effect on demand of people's business credit in Makassar City.

***Keywords: KUR Demand, Credit Interest Rate, Collateral Value, Income, Credit Term***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang .....	16
1.2 Rumusan Masalah .....	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Landasan Teori .....	24
2.1.1 Kredit .....	24
2.1.2 Permintaan Kredit Usaha Rakyat .....	27
2.1.3 Suku Bunga Kredit.....	29
2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	31
2.1.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	33
2.1.6 Lembaga Perbankan Penyalur Kredit Usaha Rakyat .....	36
2.1.7 Nilai Agunan .....	29
2.1.8 Pendapatan .....	39
2.1.9 Jangka Waktu Kredit.....	40
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	41
2.2.1 Hubungan suku bunga kredit dengan permintaan kredit usaha rakyat41	
2.2.2 Hubungan nilai agunan dengan permintaan kredit usaha rakyat.....	42
2.2.3 Hubungan pendapatan dengan permintaan kredit usaha rakyat .....	43

2.2.4 Hubungan jangka waktu kredit dengan permintaan kredit usaha rakyat .....	44
2.3 Tinjauan Empiris .....	45
2.4 Kerangka Pikir Penelitian .....	38
2.5 Hipotesis Penelitian .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.3 Populasi dan Sampel .....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.5 Analisis Data .....	50
3.5 Definisi Operasional .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.1.1 Kota Makassar .....	53
4.2 Identitas Responden .....	54
4.3 Deskripsi Responden Terhadap Variabel .....	58
4.4 Hasil estimasi .....	60
4.4.1 Uji Signifikansi Parameter (Uji t).....	62
4.5 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	64
4.5.1 Uji Normalitas Data .....	64
4.5.2 Uji Multikolinearitas .....	65
4.5.3 Uji Heterokedastisitas .....	66
4.5.4 Uji Autokorelasi.....	67
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
4.6.1 Pengaruh Suku Bunga Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar.....	58
4.6.2 Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar.....	69
4.6.3 Pengaruh Pendapatan Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar.....	70
4.6.4 Pengaruh Jangka Waktu Kredit Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat Sulawesi Selatan .....	18
Gambar 1. 2 Penyaluran & Permintaan KUR Kota Makassar .....	20
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian .....	46
Gambar 4. 1 Bagian Hasil Penelitian .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Kecamatan di Kota Makassar dan Luas Wilayah .....	53
Tabel 4. 2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 4. 3 Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 4. 4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	55
Tabel 4. 5 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	55
Tabel 4. 6 Identitas Responden Berdasarkan Bank Penyalur .....	56
Tabel 4. 7 Deskripsi Responden Terhadap Suku Bunga KUR .....	57
Tabel 4. 8 Deskripsi Responden Terhadap Nilai Agunan.....	57
Tabel 4. 9 Deskripsi Responden Terhadap Pendapatan .....	58
Tabel 4. 10 Deskripsi Responden Terhadap Jangka Waktu Kredit .....	59
Tabel 4. 11 Hasil Estimasi Regresi .....	60
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas Data .....	64
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas .....	65
Tabel 4. 14 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	66
Tabel 4. 15 Hasil Uji Autokorelasi .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar adalah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hingga Oktober 2022 kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2022).

Namun, kemajuan pesat yang telah dicapai oleh UMKM ini ternyata masih dihadapkan oleh sejumlah kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akses terhadap informasi serta keterbatasan dalam memperoleh akses pada kredit atau pembiayaan. Keterbatasan dalam memperoleh kredit atau pembiayaan menjadi hambatan serius karena modal yang cukup merupakan faktor penting dalam mengembangkan usaha. Akibatnya, potensi pertumbuhan UMKM terhambat dan peluang investasi dalam sektor ini pun terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7 tahun 2021) memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan. Regulasi ini bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank serta memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh



pendanaan serta membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah .

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagian besar UMKM adalah melalui layanan yang disediakan oleh perbankan. Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang berperan dalam menangani masalah keuangan dan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan menyediakan berbagai layanan perbankan, seperti pinjaman usaha, pembiayaan, rekening bisnis, dan solusi keuangan lainnya, bank dapat membantu UMKM mengatasi tantangan finansial, meningkatkan akses terhadap modal, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, peran bank sangatlah krusial dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya serta berkontribusi pada perekonomian negara secara keseluruhan.

Menurut Kasmir (2019) peranan perbankan dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk menjembatani antara pemilik dana dan peminjam dana. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui peningkatan pendapatan nasional.

Kredit merupakan salah satu aktivitas lembaga keuangan yang mempunyai peran penting bagi masyarakat yang menerima, yaitu kredit dapat berfungsi sebagai modal usaha atau pengadaan barang dan jasa. Kredit merupakan

aktivitas bank yang paling dominan dari seluruh kegiatan aktivitas operasional bank sebagaimana fungsi utama bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Adanya kebutuhan pembiayaan untuk terus meningkatkan pertumbuhan bagi sektor UMKM membuat kredit perbankan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan. Tersedianya kredit perbankan memungkinkan UMKM untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri.

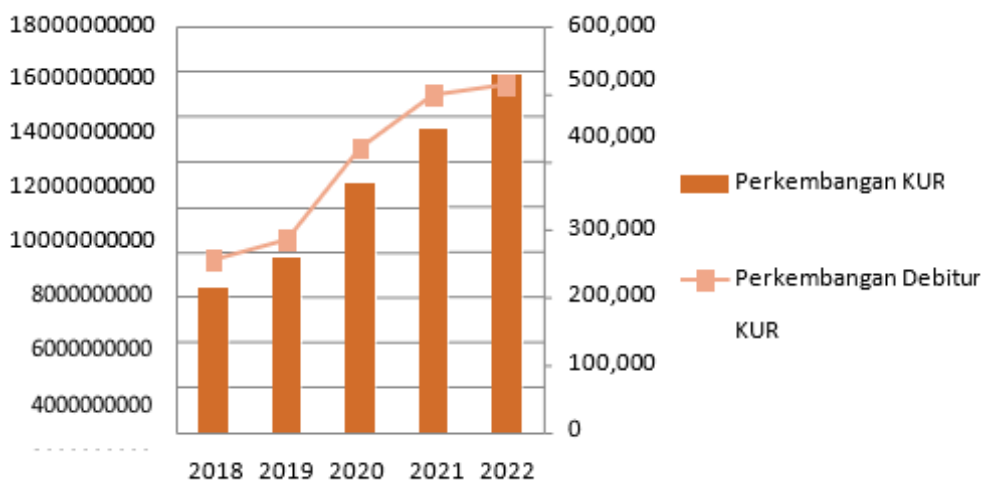
Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia, pemerintah meluncurkan sebuah program yaitu kredit usaha rakyat (KUR). KUR merupakan program utama pemerintah untuk mendukung UKM dengan memberikan kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan ini dapat digunakan oleh peminjam individu, perusahaan dan/atau kelompok perusahaan yang efisien dan memenuhi syarat. Tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas ketersediaan pembiayaan bagi usaha produktif, meningkatkan daya saing UKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Kemenkeu, 2019).

UMKM memiliki hubungan yang erat dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu program yang ditujukan untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. KUR dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, UMKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Meskipun tujuannya adalah memberikan akses pembiayaan kepada usaha rakyat, tidak semua usaha rakyat secara otomatis dapat memperoleh KUR.

Terdapat syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk memenuhi kelayakan mendapatkan KUR yang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan panduan yang diterapkan oleh lembaga keuangan atau bank yang menyediakan KUR. Pada beberapa lembaga keuangan yang menyalurkan KUR, KUR diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki status usaha yang terdaftar secara resmi.

Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, menunjukkan perkembangan yang sangat baik dalam kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti yang terlihat dari data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan tahun 2022. Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menduduki peringkat ke-5 di antara provinsi-provinsi lainnya dalam hal penyaluran KUR nasional dengan jumlah penyaluran sebesar 14,2 Triliun rupiah, sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Sumber: *Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), 2022*

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat Sulawesi Selatan**

Berdasarkan gambar, terlihat bahwa kredit usaha rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah debitur KUR di

provinsi tersebut selama 5 tahun terakhir. Hal ini memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan kredit usaha rakyat yang terus meningkat dari tahun ke tahun berperan penting dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi Sulawesi Selatan.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Kota Makassar merupakan pusat perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata di wilayah timur Indonesia. UMKM di Kota Makassar juga mengalami pertumbuhan pesat dan beragam, meliputi sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi lokasi, penyaluran kredit masih terfokus di Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan.

Kota Makassar menjadi lokasi utama untuk penyaluran KUR dengan jumlah tertinggi di Sulawesi Selatan. Pada pertengahan tahun 2022, penyaluran KUR tertinggi di Sulawesi Selatan terjadi di Kota Makassar yang mencapai Rp969,40 miliar atau setara dengan 11,49% dari total penyaluran KUR di provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Kota Makassar memiliki peran sentral dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan fokus utama dari program KUR. Keberhasilan Kota Makassar dalam menyalurkan jumlah KUR yang signifikan mencerminkan daya tarik serta potensi perekonomian lokal dalam mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah Kota Makassar.



Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), 2022

**Gambar 1. 1**  
**Penyaluran & Permintaan KUR Kota Makassar**

Berdasarkan data, terlihat tren penyaluran dan permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar selama periode 2018-2022. Penyaluran KUR mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan permintaan KUR Kota Makassar yang juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam penyaluran KUR di Kota Makassar selama 5 tahun terakhir, terdapat perbedaan antara jumlah dana KUR yang dialokasikan untuk UMKM dan permintaan yang sebenarnya. Salah satu alasannya adalah karena beberapa debitur tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang berakibat pada permintaan yang lebih rendah daripada alokasi dana yang tersedia.

Keberadaan debitur yang tidak memenuhi persyaratan KUR dapat mempengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan KUR di Kota Makassar. Meskipun penyaluran KUR terus meningkat, tetapi sebagian dana yang dialokasikan belum dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya keterbatasan kelayakan debitur. Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Kota Makassar, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Kota Makassar. Salah satu upaya tersebut adalah dengan

memanfaatkan program KUR yang disediakan oleh pemerintah melalui perbankan. Namun, untuk dapat meningkatkan penyaluran KUR kepada UMKM di Kota Makassar, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan KUR oleh UMKM di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan dalam melihat fenomena kredit usaha rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah suku bunga kredit berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar?
2. Apakah nilai agunan berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar?
4. Apakah jangka waktu kredit berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga kredit terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai agunan terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar
4. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu kredit terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ragam penelitian tentang analisis factor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada KUR di Kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Dengan mengetahui adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan sektor perbankan dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin *credo* atau *credere*, yang berarti menaruh kepercayaan. Kredit merupakan salah satu aktivitas lembaga keuangan yang mempunyai peran penting bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. Bagi masyarakat yang menerima, kredit dapat berfungsi untuk modal usaha atau pengadaan barang dan jasa. Sedangkan bagi lembaga itu sendiri, pemberian kredit akan memberikan keuntungan yang didapat dari bunga yang dibebankan kepada debitur. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Umum kepada nasabahnya dapat berupa kredit kredit konsumsi, modal kerja dan investasi, yang di berikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Menurut Rivai (2013), kredit merujuk pada proses penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) kepada pihak lain (debitur atau penerima pinjaman) berdasarkan kepercayaan, dengan kesepakatan bahwa penerima kredit akan membayar kembali kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh keduanya. Dalam transaksi kredit, pemberi kredit memberikan kepercayaan kepada penerima kredit untuk menggunakan dana atau mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tertentu, dengan harapan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan



dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, kredit didefinisikan sebagai suatu bentuk penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang. Penyediaan ini terjadi melalui kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, biasanya disertai dengan pembayaran bunga. Dengan demikian, kredit menjadi suatu mekanisme yang memungkinkan pihak peminjam untuk mendapatkan dana atau tagihan yang dibutuhkan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu dan dengan kondisi yang telah disepakati bersama, termasuk pembayaran bunga sebagai pengganti pemakaian dana tersebut.

Menurut Kasmir (2019) kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, dimana fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Meningkatnya *utility* (daya guna) dari modal/uang.

Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi.

b) Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.

Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi, sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening Koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promise, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

d) Menambah gairah berusaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Kredit adalah salah satu cara untuk dapat memperoleh uang dan kemudian oleh pelaku ekonomi dapat dipergunakan untuk meningkatkan usahanya.

e) Alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah- langkah stabilisasi harus dilakukan untuk pengendalianinflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, hingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat

f) Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Bila keuntungan secara komulatif dikembangkan lagi, dalam artian dikembalikan kedalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

g) Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Melalui bantuan kredit antarnegara hubungan antar pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama untuk hubungan perekonomian dan perdagangan.

### **2.1.2 Permintaan Kredit Usaha Rakyat**

Menurut Nasroen & Yasabari (2019), permintaan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Permintaan kredit juga diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Permintaan kredit cenderung disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi keuangan masyarakat ataupun perekonomian secara umum. Adanya permintaan kredit terutama bagi masyarakat, kredit dapat berfungsi untuk modal usaha atau pengadaan barang dan jasa. Selain itu, permintaan kredit akan meningkat apabila konsumsi sekarang tinggi, *ceteris paribus* (Hartono, 2020).

Menurut Purwanti (2023), peminjam dan pemberi pinjaman memilih suku bunga sebagai alat dalam memilih obligasi dan kredit. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari pokok. Selain mengembalikan pokok, atau jumlah asli yang dipinjam, peminjam biasanya membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan teori ini, permintaan kredit dipengaruhi oleh tingkat bunga pinjaman (*interest rate on Loans*), tingkat bunga obligasi (*interest rate on bonds*), dan GNP. Selain hal yang tersebut di atas, terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit seperti *consumer confidence*, tingkat keuntungan (*rate of profit*), keadaan demografi,

pertumbuhan tingkat pendapatan dan kekayaan, dan nilai tukar, bahkan termasuk nilai budaya yang berkembang pada masyarakat setempat.

Menurut Hartono (2020) permintaan kredit merujuk pada kebutuhan atau keinginan individu, perusahaan, atau lembaga lain untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan dari pihak pemberi kredit, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Permintaan kredit timbul ketika pihak yang membutuhkan dana ingin mengakses sumber pembiayaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan modal, investasi, pembelian barang atau jasa, atau pengembangan usaha. Permintaan kredit dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadaan ekonomi, kondisi pasar, tingkat suku bunga, kebijakan perbankan, kepercayaan terhadap pertumbuhan usaha, dan proyeksi arus kas masa depan. Individu atau perusahaan akan mengajukan permohonan kredit berdasarkan kebutuhannya, dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh penyalur kredit.

Menurut Latuconsina (2016) permintaan kredit dapat bersifat jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada tujuan penggunaan dana dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Permintaan kredit yang tinggi dapat menjadi indikator aktivitas ekonomi yang positif, karena menunjukkan adanya minat untuk berinvestasi, memperluas usaha, atau membiayai konsumsi yang lebih besar. Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merujuk pada permohonan atau kebutuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk memperoleh akses pembiayaan melalui program KUR yang disediakan oleh pemerintah melalui perbankan. KUR bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM dengan memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap dana atau kredit.

Permintaan KUR timbul ketika UMKM membutuhkan dana untuk berbagai keperluan usaha, seperti modal kerja, pembelian peralatan, pengembangan

produk, perluasan usaha, dan lain sebagainya. UMKM yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan KUR kepada bank atau lembaga keuangan yang menyediakan program ini. Permintaan KUR dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan dan kebutuhan usaha UMKM, kebutuhan modal kerja, peluang pasar, serta kepercayaan terhadap program KUR sebagai sumber pembiayaan yang terjangkau dan mendukung pertumbuhan usaha. Permintaan KUR yang tinggi dapat menjadi indikasi tingginya minat UMKM untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah (Suryani et al., 2019).

### **2.1.3 Suku Bunga Kredit**

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Penetapan suku bunga merupakan salah satu aturan kegiatan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, dimana pelaksanaan kredit perbankan didasarkan oleh tingkat suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Rate (BI Rate). Dalam menentukan suku bunga acuan, Bank Indonesia mempertimbangkan banyak faktor ekonomi didalamnya (Kasmir, 2019). Suku bunga memegang peranan penting dalam perekonomian yaitu:

1. Suku bunga membantu menjamin simpanan agar dapat mengalir kepada investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
2. Suku bunga mendistribusikan dana kepada kredit yang layak, menyediakan dana pinjaman kepada proyek investasi yang menghasilkan perkiraan tingkat pengembalian yang paling tinggi.

3. Suku bunga membawa penawaran dana menuju kepada keseimbangan dengan permintaan dana dari publik.
4. Suku bunga sebagai suatu alat yang penting bagi pemerintah untuk mempengaruhi jumlah simpanan dan investasi.

Bila pertumbuhan ekonomi sangat lambat dan pengangguran meningkat, maka pemerintah dapat menggunakan kebijakannya dengan menurunkan suku bunga dalam rangka untuk merangsang pinjaman dan investasi. Namun sebaliknya, bila perekonomian mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi maka pemerintah menggunakan kebijakannya untuk menaikkan suku bunga untuk memperlambat tingkat pinjaman dan investasi guna meningkatkan simpanan

Suku bunga kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya pinjaman yang lebih besar, sementara suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi biaya pinjaman. Pada umumnya, suku bunga kredit dapat berbeda antara jenis kredit yang berbeda, seperti kredit konsumsi, kredit investasi, atau kredit perumahan. Selain itu, suku bunga kredit juga dapat bersifat tetap atau dapat berubah-ubah. Suku bunga kredit memiliki peran penting dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit, serta mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar cicilan atau bunga (Rompas, 2018).

Sementara itu, suku bunga KUR merupakan suku bunga khusus yang diterapkan pada program KUR yang disediakan oleh pemerintah melalui perbankan. Suku bunga KUR biasanya lebih rendah dibandingkan suku bunga konvensional untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Suku bunga KUR ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan yang menyediakan program KUR, dan biasanya pemerintah memberikan subsidi atau insentif tertentu untuk mengurangi beban suku bunga tersebut. Meskipun suku

bunga KUR dapat dipengaruhi oleh suku bunga acuan, seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate, tetapi suku bunga KUR sendiri memiliki mekanisme dan penetapan yang berbeda sesuai dengan program KUR yang ada. Oleh karena itu, suku bunga KUR tidak secara langsung mengikuti fluktuasi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral (Anjani & Purnamasari, 2023).

#### **2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah unit usaha produktif yang mandiri, dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh individu atau Badan Usaha yang beroperasi secara independen, tanpa ketergantungan pada entitas atau perusahaan besar. UMKM dapat mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Dengan skala yang relatif kecil, UMKM seringkali menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. UMKM juga seringkali menjadi wadah bagi kreativitas, inovasi, dan keberagaman pelaku usaha, serta menjadi sarana untuk memperluas partisipasi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial (Syahbudi, 2021).

Dalam UU Cipta Kerja, kriteria UMKM dapat mencakup berbagai faktor seperti modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk setiap sektor usaha. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi masyarakat dengan skala kecil dan masih beroperasi secara tradisional. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Penjelasan mengenai usaha kecil tradisional pada UU ini adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, atau berkaitan dengan seni dan budaya. Adapun kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 dan sudah berbentuk usaha perorangan. Usaha menengah atau besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Menurut Rahmadani dan Subroto (2022) berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Kualitasnya belum memenuhi standar, hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM belum memiliki teknologi yang seragam dan biasanya produk yang dihasilkan dalam bentuk *handmade* (manual) sehingga dari sisi kualitas relatif beragam.
2. Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM karena keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya tentang produk karena selama ini UMKM bekerja didasarkan pada order, tidak banyak yang berani berkreasi dengan mencoba desain baru.
3. Terbatasnya jenis produk, biasanya UMKM hanya memproduksi sejenis atau terbatas sehingga apabila ada permintaan model baru dari *buyer* sulit untuk memenuhi karena kesulitan dalam penyesuaian dan waktunya biasanya sangat panjang untuk memenuhi order tersebut.
4. Terbatasnya kapasitas dan *price list* produknya, biasanya kapasitas produk yang sulit untuk ditetapkan dan harga yang tidak terukur dapat menyulitkan para pembeli atau konsumen.



Menurut Kemenko Perekonomian (2020) yang dimaksud dengan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.

Kemudian, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.

#### **2.1.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Menurut Marfuah dan Hartiyah (2019) kredit usaha rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur. KUR dapat digunakan oleh UMKM untuk berbagai

keperluan, seperti modal kerja, investasi, pembelian peralatan, renovasi, dan pengembangan usaha.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak atau yang termasuk dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Pembiayaan KUR meliputi berbagai sektor usaha, termasuk pertanian, perdagangan, industri kecil, jasa, dan lainnya. Pemerintah mengalokasikan dana yang disubsidi untuk program ini agar UMKM dapat mengakses modal dengan lebih terjangkau dan memperoleh dukungan finansial untuk mengembangkan usaha (Sujarweni dan Utami, 2015).

Menurut Kemenko Perekonomian (2020) adanya KUR diharapkan dapat membantu pembangunan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari bank pelaksana. Pada dasarnya kredit usaha rakyat (KUR) pada setiap lembaga keuangan memiliki jenis yang berbeda-beda. Namun secara umum kredit usaha rakyat (KUR) dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. KUR Mikro

Jenis kredit usaha rakyat ini diperuntukkan bagi usaha kecil berskala mikro. Besaran permodalan atau plafon kreditnya dibatasi hingga maksimal Rp25.000.000. Namun untuk besaran maksimal pinjaman KUR Mikro ini bisa berbeda, tergantung dari aturan bank pelaksana masing-masing. Prinsipnya pada jenis KUR Mikro ini menasar pada jenis usaha kecil yang produktif dan prospektif dari sisi profit. Dengan begitu, pelaku usaha ini diharapkan dapat membayar cicilan kredit dengan waktu yang disepakati dengan pihak bank baik cicilan per bulan atau per tahun. Dalam hal pelunasan kredit, KUR

Mikro ini biasanya membagi dalam dua kategori yaitu selama tiga tahun untuk usaha kredit modal kerja dan selama lima tahun untuk usaha kredit investasi. Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi calon debitur (peminjam) untuk memperoleh KUR Mikro seperti pelaku usaha yang serius menjalankan usahanya dalam waktu tiga bulan terakhir dan juga pelaku usaha yang pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bersertifikat hingga usaha yang dijalankan itu masuk kategori layak dan produktif.

## 2. KUR Retail

Dari sisi jumlah pinjaman, KUR Retail lebih besar dari KUR Mikro. Sebab KUR Retail mampu memberikan pinjaman modal maksimal senilai Rp500 juta. Oleh karena itu, segmen yang disasar pada KUR Retail lebih kepada kalangan menengah yang mempunyai potensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Anuitas bisa diartikan juga sebagai cicilan pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya tetap yang dibayar atau diterima selama jangka waktu tertentu. Berbeda juga dengan KUR Mikro, jangka waktu pinjaman KUR Retail cenderung lebih lama yaitu paling lama empat tahun untuk kredit pembiayaan modal kerja dan lima tahun (paling lama) untuk pembiayaan investasi. Sementara untuk syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh Kredit Retail yaitu pelaku usaha harus memiliki agunan atau jaminan. Pasalnya skala bisnis di Kredit Retail bukan seperti mikro.

## 3. KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

KUR TKI ini merupakan bentuk bantuan permodalan yang diberikan Pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Kredit ini diharapkan dapat digunakan sebagai modal awal TKI untuk melakukan perjalanan ke negeri tujuan tempatnya bekerja. Terkait KUR TKI, Pemerintah lewat jalur APBNnya telah menjalankan struktur dengan

pemerataan alokasi, stabilisasi dan distribusinya. Tujuannya agar bantuan modal ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan diterima dalam bentuk nyata. Sejatinya setiap TKI dapat menerima pinjaman modal ini maksimal Rp25.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7% per tahun. Soal tempo pengembaliannya ditargetkan paling lama tiga tahun sejak pinjaman cair.

#### **2.1.6 Lembaga Perbankan Penyalur Kredit Usaha Rakyat**

Lembaga penyalur KUR adalah lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat. Pada tahun 2021, terdapat 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Beberapa contoh dari lembaga perbankan penyalur KUR adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Sinarmas, Bank Maybank Indonesia, dan Bank Bukopin (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

##### **1. BRI (Bank Rakyat Indonesia)**

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan merupakan bank milik pemerintah. BRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 dan awalnya berfungsi sebagai lembaga perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perkebunan. Namun, seiring berjalannya waktu, BRI telah berkembang menjadi bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, kredit, dan layanan perbankan digital. BRI juga memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui program-program seperti kredit mikro dan koperasi.

##### **2. BNI (Bank Negara Indonesia)**

Bank Negara Indonesia adalah bank milik pemerintah yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, BNI memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sektor perbankan di negara ini. BNI menyediakan berbagai produk dan layanan, termasuk tabungan, giro, deposito, kredit, dan layanan perbankan korporasi. BNI juga berfokus pada pelayanan perbankan yang inovatif dan telah menghadirkan berbagai solusi digital untuk memudahkan akses nasabah.

### 3. Mandiri (Bank Mandiri)

Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia dari segi aset dan juga merupakan bank milik pemerintah. Bank ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 melalui penggabungan empat bank BUMN (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia). Bank Mandiri menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk tabungan, giro, deposito, kredit, investasi, dan layanan perbankan syariah. Sebagai bank terbesar, Bank Mandiri juga aktif dalam mendukung sektor korporasi dan perbankan syariah di Indonesia.

Setiap bank memiliki fokus dan spesialisasi tertentu dalam menyediakan layanan dan produk untuk masyarakat dan sektor bisnis di Indonesia. Sebagai lembaga perbankan penyalur kredit, BRI, BNI, dan Mandiri memiliki peran penting dalam memberikan dukungan finansial bagi berbagai sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan negara (Hadinoto, 2017).

### **2.1.7 Nilai Agunan**

Dalam proses pemberian kredit yang kepada rakyat mengandung risiko sehingga berpatokan terhadap prinsip kehati-hatian. Untuk memperoleh keyakinan dari bank atas dana yang diberikan berupa kredit, agunan merupakan salah satu hal paling diutamakan. Agunan ditetapkan bank sebagai syarat untuk melakukan peminjaman Apabila kreditur mengalami kemacetan dalam membayar pinjaman, pihak bank berhak untuk menjual agunan tersebut jika sewaktu-waktu debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran kreditnya. Benda yang bisamenjadi agunan ialah milik perorangan yang dibuktikan dengan surat hak milik yang berbadan hukum. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan (Kasmir, 2019).

Menurut Undang-Undang Perbankan, agunan adalah bentuk jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman kredit. Agunan ini diberikan secara sadar oleh debitur dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan kepada kreditur terkait pembayaran kembali pinjaman. Dengan memberikan agunan, debitur menyerahtherimakan hak atas aset atau properti tertentu kepada kreditur sebagai jaminan bahwa pinjaman akan dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Agunan ini menjadi sarana bagi kreditur untuk melindungi kepentingan dan risiko dalam memberikan pinjaman kepada debitur.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018), suatu barang yang dapat dijadikan agunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/harga yang relatif stabil (*valuability*), serta dapat dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli (*marketability*).
2. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi factor subjektifitas tinggi (*ascertainability*).
3. Mempunyai nilai yuridis (*legality*) dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta dapat dipindah-tangankan kepemilikannya (*transferability*).

### **2.1.8 Pendapatan**

Menurut Harnanto (2019), pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia yang bebas, baik dalam bentuk uang maupun material lainnya. Dengan kata lain, pendapatan adalah imbalan yang diterima seseorang atau kelompok atas kontribusi mereka dalam menghasilkan barang atau jasa. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, upah, sewa, bunga, dividen, dan lain-lain. Pendapatan juga dapat diperoleh melalui aktivitas ekonomi lainnya seperti investasi, perdagangan, dan usaha. Menurut Rahardja dan Manurung (2019) sumber-sumber pendapatan terdapat tiga sumber pendapatan yaitu:

1. Gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

2. Asset produktif

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya.

### 3. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

#### **2.1.9 Jangka Waktu Kredit**

Jangka waktu kredit adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang (Kasmir, 2019). Terdapat beberapa jangka waktu kredit, antara lain:

1. Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
3. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

Menurut Kemenko Perekonomian (2020), dalam kredit usaha rakyat (KUR) jangka waktu kredit terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1. Jangka waktu KUR Mikro:
  - a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas menjadi:

- a. Untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 4 tahun



- b. Untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimum 7 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal.

2. Jangka waktu KUR Ritel:

- a. Paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;  
atau
- b. Paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Dalam hal ini diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu KUR Ritel menjadi:

- a. Untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (lima) tahun
- b. Untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

3. KUR TKI

Jangka waktu KUR Penempatan TKI paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan suku bunga kredit dengan permintaan kredit usaha rakyat**

Faktor yang mempengaruhi permintaan kredit diantaranya adalah tingkat suku bunga kredit. Semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan, dan sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah permintaannya. Dan hal tersebut seperti halnya dengan perbankan, semakin rendah suku bunga yang ditawarkan oleh bank, maka semakin tinggi permintaan kredit masyarakat dan sebaliknya semakin tinggi suku bunga yang

ditawarkan oleh bank maka semakin sedikit jumlah permintaan kredit (Mishkin, 2008).

Dari segi permintaan, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga kredit perbankan, apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan maka Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Aplikasi hukum permintaan terhadap perkreditan adalah tingkat suku bunga kredit yang rendah menunjukkan baiknya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang diminta oleh masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang tinggi menunjukkan menurunnya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang diminta oleh masyarakat akan menurun.

Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Ini artinya jika suku bunga nominal tinggi, walaupun suku bunga riil rendah, pelaku ekonomi akan memilih kredit dengan durasi yang pendek, yang pada gilirannya membatasi volume kredit yang dipinjam (Sandrina et al., 2016).

### **2.2.2 Hubungan nilai agunan dengan permintaan kredit usaha rakyat**

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank adalah jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan dari bank atas dana yang diberikan berupa kredit, agunan merupakan salah satu hal paling diutamakan. Apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran kredit, bank dapat mengambil agunan sebagai alternatif pembayaran. Barang yang dapat dijadikan agunan adalah *real property* yaitu hak perseorangan atau badan untuk memiliki dan menguasai tanah dengan

suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut pengembangan yang melekat padanya (Mulyati dan Dwiputri, 2018).

Nilai agunan dapat mempengaruhi permintaan kredit dalam hal meningkatkan kemampuan debitur untuk memperoleh kredit. Dalam hal ini, jika seorang debitur memiliki agunan yang bernilai tinggi, maka bank atau lembaga keuangan akan merasa lebih percaya diri dalam memberikan kredit karena agunan dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan debitur untuk memperoleh kredit yang diinginkan. Jumlah kredit yang dapat diberikan oleh bank atau lembaga keuangan biasanya tergantung pada nilai agunan yang disediakan oleh peminjam.

Semakin tinggi nilai agunan, semakin besar kemungkinan peminjam dapat memperoleh kredit yang lebih besar. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan bank atau lembaga keuangan karena agunan yang bernilai tinggi dapat meningkatkan kepercayaan bank atau lembaga keuangan terhadap debitur. Nilai agunan secara keseluruhan dapat meningkatkan permintaan kredit karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan peminjam untuk memperoleh kredit, meningkatkan jumlah kredit yang dapat diberikan, dan meningkatkan kepercayaan bank atau lembaga keuangan terhadap debitur (Kosasih, 2021).

### **2.2.3 Hubungan pendapatan dengan permintaan kredit usaha rakyat**

Pendapatan memang memiliki hubungan yang erat dengan kredit. Tingkat pendapatan merupakan faktor yang penting dalam penerimaan jumlah kredit yang diminta, karena dari pendapatan tersebut dapat diketahui kemampuan seseorang dalam mengembalikan kredit tersebut nantinya. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan pihak bank untuk menentukan besar kecilnya kredit yang akan disesuaikan dengan tingkat pendapatan nasabah agar proses pengembalian kredit berjalan dengan lancar. Dengan demikian, orang dengan pendapatan yang

lebih tinggi cenderung lebih mudah memperoleh persetujuan pinjaman dari lembaga keuangan, karena dianggap lebih mampu membayar kembali pinjaman (Widarno, 2018).

Pendapatan dapat mempengaruhi permintaan kredit karena semakin tinggi pendapatan seseorang, kemampuan untuk membayar kembali pinjaman/kredit yang diminta akan semakin besar. Selain itu, semakin tinggi pendapatan individu, semakin besar kemungkinannya memiliki kebutuhan atau keinginan yang lebih besar, seperti membeli rumah atau mobil, memulai bisnis, hingga mengembangkan bisnis agar lebih produktif. Dalam banyak kasus, kebutuhan atau keinginan ini memerlukan sumber dana tambahan yang tidak tersedia di dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih sering mengajukan permintaan kredit (Dewi, 2016).

#### **2.2.4 Hubungan jangka waktu kredit dengan permintaan kredit usaha rakyat**

Jangka waktu kredit mengacu pada waktu yang diberikan untuk membayar kembali pinjaman, dan dapat bervariasi sesuai dengan lembaga keuangan yang menyalurkan kredit tersebut. Jangka waktu adalah salah satu pertimbangan untuk mengambil kredit karena akan menentukan besaran angsuran perbulan nasabah. Jangka waktu yang dimaksud adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk mengembalikan seluruh kredit yang diambil. Jangka waktu kredit yang semakin panjang maka akan berpengaruh pada kecilnya jumlah angsuran kredit, hal ini akan meringankan beban utang debitur bila dibandingkan dengan jangka waktu kredit yang pendek (Bank Indonesia, 2020).

Secara umum, jangka waktu kredit yang lebih pendek cenderung menarik bagi UMKM dengan kebutuhan pendanaan yang mendesak atau proyek bisnis yang memiliki periode pengembalian modal yang singkat. Dalam hal ini,

permintaan KUR dengan jangka waktu pendek mungkin lebih tinggi karena UMKM ingin segera mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional atau investasi cepat. Di sisi lain, UMKM yang memiliki proyek bisnis dengan periode pengembalian yang lebih panjang atau membutuhkan dana untuk ekspansi jangka panjang mungkin lebih tertarik dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang. Permintaan KUR dengan jangka waktu yang lebih lama dapat memberikan UMKM fleksibilitas dalam melunasi pinjaman secara berkala tanpa menimbulkan beban pembayaran yang terlalu tinggi dalam jangka pendek (Harefa, 2017).

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Tinjauan empiris yaitu kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian- penelitian yang menyangkut permintaan kredit. Oleh karena itu, beberapa tinjauan empiris yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Susanto (2018) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Suku Bunga Pendapatan, Jangka Waktu Kredit Dan Taksiran Jaminan Nasabah, Terhadap Jumlah Pengambilan Kredit Di PD BPR Bank Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga, pendapatan, jangka waktu kredit dan taksiran jaminan terhadap jumlah pengambilan kredit nasabah pada PD BPR Bank Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, pendapatan dan jangka waktu kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pengambilan kredit sedangkan taksiran jaminan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengambilan kredit nasabah pada PD BPR Bank Klaten.

Sari (2020) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Jaminan Kredit, Dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Permintaan Kur Bank Bni Magelang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat suku bunga kredit, jaminan kredit, dan jangka waktu pengembalian secara simultan

berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR). Tingkat suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR). Jaminan kredit dan Jangka waktu berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat (KUR).

Anastasia & Hidayat (2019) melakukan penelitian berjudul Nilai Agunan, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Dan Kredit Perbankan. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan hubungan kausalitas harga rumah dan pinjaman tidak dapat dikonfirmasi. Sedangkan secara teoritis, harga rumah dan besarnya pinjaman menunjukkan indikasi hubungan timbal balik, oleh karena itu diperlukan faktor lain untuk menganalisa perkembangan nilai properti terutama produk residensial di Indonesia. Selain itu variabel tingkat suku bunga dan pendapatan masyarakat menunjukkan hubungan jangka panjang dengan kredit perbankan.

Pangandaheng, dkk (2018) melakukan penelitian berjudul Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Sulutgo Cabang Tahuna. Hasil penelitian yang diperoleh adalah variabel suku bunga dan laju inflasi, keduanya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank Sulutgo Cabang Tahuna.

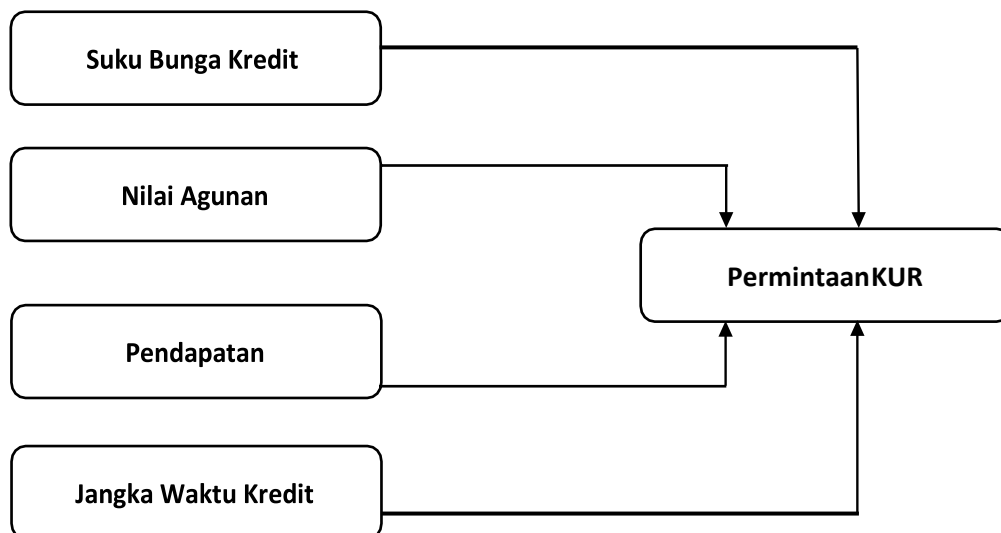
## **2.4 Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar. Suku bunga kredit akan memberikan pengaruh negatif terhadap permintaan kredit usaha rakyat karena semakin tinggi suku bunga kredit minat masyarakat dalam melakukan permintaan kredit usaha rakyat akan semakin menurun. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman sehingga mengurangi insentif bagi masyarakat untuk mengambil kredit.

Nilai agunan akan memberikan pengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat. Ketersediaan agunan masyarakat yang baik atau nilai yang lebih tinggi dapat meningkatkan permintaan kredit, karena hal tersebut memberikan keyakinan kepada lembaga perbankan bahwa risiko kredit dari debitur akan lebih rendah.

Pendapatan akan memberikan pengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat. Semakin tinggi nilai pendapatan debitur maka semakin besar kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit. Sedangkan jangka waktu kredit akan memberikan pengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat. Hal ini karena semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada debitur maka minat debitur dalam melakukan permintaan kredit akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian terkait hubungan antar variabel diatas, maka pengaruh dari tiap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan pada kerangka pikir dibawah ini:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Untuk melakukan analisa terhadap permintaan kredit usaha rakyat di kota Makassar maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit usaha rakyat
- 2) Diduga nilai agunan berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat
- 3) Diduga jangka waktu kredit berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat
- 4) Diduga pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat.